

EDISI 157/TAHUN XIV/OKTOBER 2012

TROBOS

Livestock

MEDIA AGRIBISNIS & PETERNAKAN



www.ceva.co.id

Ayam & Telur: Andalan Pangan Olahan

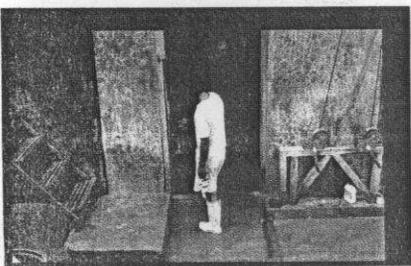
Rp 18.000,-

ISSN 2301-4547

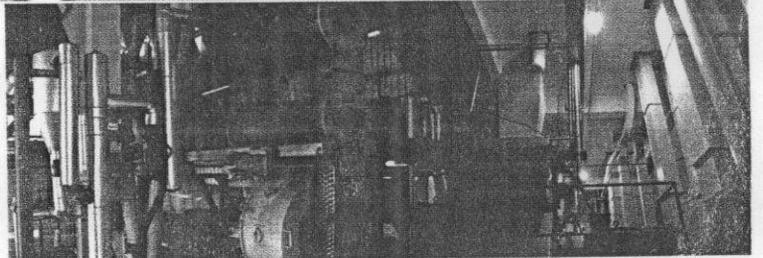


9 772301 452475

www.trobos.com



 ZHENG CHANG





Muladno*

Kebijakan Unggas Samakan Seperti Sapi

Kebijakan pemerintah tentang swasembada daging telah meningkatkan gairah peternak untuk kembali menekuni usaha peternakan sapi karena harga sapi di tingkat peternak sangat baik. Memang dengan kebijakan tersebut, pemerintah terus membatasi kuota impor daging beku dan sapi bakalan sampai hanya 10 % pada 2014 nanti.

Di sana-sini memang ada keluhan kesulitan mencari sapi, tapi hasil sensus sapi dan kerbau 2011 lalu mengindikasikan bahwa persediaan sapi di dalam negeri masih mencukupi kebutuhan daging secara nasional 2012 dan diprediksi juga mencukupi sampai 2014. Dengan demikian pemerintah tetap bertahan pada kebijakannya untuk membatasi kuota impor dan memang pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang telah direncanakan sendiri.

Jelas ada korelasi kuat antara pembatasan impor dengan harga sapi di dalam negeri yang berakhir dengan suasana kondusif bagi peternak untuk beternak. Mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap komoditas ayam pedaging (*broiler*)? Fluktuasi harga bakalan ayam (*Day Old Chicken, DOC/ayam umur sehari*) dan harga ayam hidup yang tinggi telah berlangsung bertahun-tahun. Suatu saat produksi DOC *oversupply* sehingga harga DOC terjun bebas.

Telur terpaksa diaborsi agar tidak menetas dan bahkan banyak telur tetas dijual sebagai telur konsumsi. Keadaan sebaliknya (kelangkaan DOC) juga terjadi yang membuat harga DOC melangit. Bagi peternak berskala kecil, fluktuasi harga yang sering terjadi membuatnya gulung tikar hingga saat ini.

Kalau sapi bisa dikendalikan pasokan dagingnya, mestinya pasokan ayam juga bisa dikendalikan oleh pemerintah karena banyak sedikitnya *broiler* di Indonesia ditentukan oleh populasi ayam *Grand Parent Stock (GPS)* yang 100 % impor. Bila menghitung sapi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan dimiliki oleh jutaan peternak saja bisa, mestinya menghitung ayam GPS yang hanya dimiliki belasan perusahaan pembibitan ayam merupakan pekerjaan yang amat sangat mudah.

Dengan siklus hidup dan pola kehidupan "ayam industri" yang sudah tetap, maka memprediksi *supply-demand* daging ayam juga sangat mudah. Memprediksi jumlah ayam GPS yang diimpor pastinya dapat dilakukan karena pada sapi juga

bisa. Yang memiliki otoritas dalam menentukan jumlah ayam GPS yang diimpor adalah pemerintah juga. Jadi, supaya adil perlakuannya dalam menangani komoditas sapi dan komoditas ayam, mestinya pemerintah juga mengatur secara ketat impor ayam GPS-nya.

Dengan membiarkan usaha beternak *broiler* tanpa pengendalian populasi oleh pemerintah, jelas terjadi perang bisnis antar pelaku usaha. Dalam bisnis dikenal istilah "jika saya tidak mematikan usaha pesaing saya, maka usaha saya yang akan dimatikan". Namun adu kekuatan perusahaan besar tidak membuat salah satu mati. Akibat perang tersebut, yang justru mati adalah peternak berskala kecil. Situasi seperti sudah sering terjadi dan tampaknya ada pembiaran perang bisnis dalam industri perunggasan.

Selama pemerintah tidak memainkan peran dan otoritasnya dalam mengendalikan populasi ayam di sektor hulu (pembibitan), upaya yang dilakukan komunitas perunggasan agar peternak berskala kecil juga ikut menikmati gurihnya industri *broiler* akan sia-sia. Program *check-off* yang dicontohkan berhasil di negara lain dan dibahas berkali-kali kandas di tengah jalan karena tidak semua perusahaan perunggasan mendukungnya.

Kesepakatan antara pengusaha untuk mengatur *supply-demand* juga tak manjur hasilnya karena fluktuasi harga masih terjadi. Jelas energi dan pemikiran terbuang sia-sia walaupun kepuasan sesaat juga diperoleh bila merasa menang dalam perangnya. Silaturahmi antar pengusaha juga terganggu jika dalam suasana usaha tidak kondusif. Sumpah serapah terkadang muncul dalam dialog dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Secara keseluruhan, industri perunggasan beraura kurang sehat.

Jadi, waktunya pemerintah mengoptimalkan otoritasnya dalam rangka mewujudkan suasana *ayem tentrem* bagi seluruh pelaku usaha mulai dari kecil sampai kelas kakap dalam industri perunggasan di Indonesia. Para pengusaha juga sangat mengharapkan ketegasan pemerintah untuk mengatur usaha perunggasan ini sebagaimana yang sedang dilakukan pada komoditas sapi. ●TROBOS

*Guru Besar Fakultas Peternakan IPB dan pemerhati peternakan.